

PERKEMBANGAN BANK ISLAM DI BANGLADESH

Syahrudin Yasen

STIA Paris-YP AH,, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Syahrudin Yasen

E-mail: yasensyahrudin@gmail.com

Abstract

Exactly on March 14 1983, Bangladesh Islamic Bank completely delivered a banking service package. Islamic Bank Bangladesh Persero (IBBL) is the first bank in Asia to question bank interest. IBBL is a publicly owned company liable under the Companies Act, 1913, which is a multinational joint venture banking company with 64% shares distributed to foreign investors. The share distribution ratio was carried out at a ratio of 36-54%, in December 1997. This means that the ratio is 36% for the bank and 54% for savers or investors, so that it becomes an Islamic bank that has good financial stability. IBBL, like other Islamic banks, also faces capital and liquidity problems. However, IBBL continues to maintain financial stability as well as supervision and supervision by the central bank of banks that operate according to sharia (controlling and supervision by the central bank on the basis of Islamic Sharia), and always adheres to the principles and procedures of financial reporting (accounting principles and procedures)..

Keywords: *liquidity, financial stability, Islamic banking*

Abstrak

Tepat pada 14 Maret 1983, Bank Islam Bangladesh secara total mengantarkan sebuah paket pelayanan perbankan. Bank Islam Bangladesh Persero (IBBL) menjadi bank pertama kali di Asia yang mempersoalkan bunga bank. IBBL adalah perusahaan perseroan milik publik yang bertanggungjawab di bawah perusahaan Act, 1913, yang merupakan perusahaan bank joint venture multinasional dengan 64% saham dibagikan kepada penyerta modal asing. Rasio pembagian saham dilakukan dengan perbandingan 36-54%, pada Desember 1997. Artinya, 36% nisbah untuk bank dan 54% untuk penabung atau investor, sehingga menjadi bank Islam yang memiliki stabilitas keuangan yang baik. IBBL sebagaimana bank Islam lainnya, juga berhadapan masalah modal dan likuiditas. Namun IBBL tetap menjaga stabilitas keuangan (financial stability) serta pengawasan dan supervisi oleh bank sentral

terhadap bank yang beroperasi menurut syariah (controlling and supervision by the central bank on the basis of Islamic Syariah), serta selalu menganut prinsip-prinsip dan prosedur laporan keuangan (accounting principles and procedures).

Kata kunci: likuiditas, stabilitas keuangan, bank syariah

PENDAHULUAN

Bank-bank Islam di Bangladesh secara efektif memberikan pelayanan perbankan bagi kemajuan negaranya. Hal tersebut akan lebih membuka peluang bagi berjalannya sistem perekonomian dan sistem perbankan Islam dan secara totalitas memberikan manfaat yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa bank-bank Islam secara efisien tidak dapat beroperasi di bawah kerangka aturan perbankan konvensional, sementara tingkat efisiensi perbankan konvensional mengalami kelemahan, yang menurut mereka berada di bawah standar yang diharapkan. Kelemahan itu terjadi tidak hanya disebabkan oleh ketidakefisienan mekanisme perbankan Islam itu sendiri, melainkan tumpuhnya sistem operasi perbankan konvensional. Namun hal itu tidak berarti kelangsungan operasi mengalami hambatan lantaran di bawah pasungan peraturan bank konvensional yang nyaris semuanya mengalami ancaman. Fakta-fakta dari Bangladesh menunjukkan bahwa tampaknya bank-bank Islam masih dapat bertahan dalam tataran peraturan bank konvensional seperti juga yang berlaku di Indonesia. Hanya saja di Indonesia tidak disebut Bank Islam, melainkan bank syariah.

Persoalannya adalah, untuk apa kita perlu mengetahui perkembangan, kinerja dan permasalahan Bank Islam di Bangladesh? Menurut hemat penulis, setidaknya dapat menjadi studi komparasi secara tidak langsung bagi mahasiswa atau para dosen ekonomi syariah di Indonesia di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Jejak perkembangan Bank Islam di Bangladesh

Menurut studi yang dilakukan Muhammad Awal Saker, kehadiran Bank Islam di Bangladesh bermula dari kerisauan masyarakat Islam terhadap sistem bunga, yang pada abad sebelumnya diawali oleh penjajahan Inggris.

Sejak berdirinya negara Bangladesh, terdapat kecenderungan baru di sektor perbankan dalam dan luar negeri.¹

Perbankan Islam di negara ini telah mengalami loncatan luar biasa dan mencapai kesuksesan ketika dilakukan uji coba di kota Mesir. Bahkan setelah itu, sejak pemerintahan Perdana Menteri Gamal Abdul Nasser, proses pendirian Bank Islam dengan model bank sosial berjalan dengan baik.

Berselang 17 tahun kemudian, Bank Pembangunan Islam (IDB) dan sederetan bank-bank Islam nasional Bangladesh menandai berdirinya Bank Islam dunia. Dalam negeri, Persatuan Islam Bangladesh dengan penuh semangat bekerja mengangkat citra Islam sebagai pedoman hidup yang sempurna. Mereka menemukan perbankan Islam cukup siap dijadikan model pengelolaan keuangan negara yang dapat mengantarkan perbaikan perekonomian nasional Bangladesh.

Dua badan profesional seperti biro penelitian ekonomi Islam (IERB) dan asosiasi pekerja perbankan Islam (BIBA) secara bertahap mengambil bagian pada setiap pelatihan perekonomian yang diadakan oleh perhimpunan pekerja Bank Islam dan secara teratur mengadakan seminar internasional untuk mendapatkan masukan di tingkat lokal dan luar negeri, serta menjemput investor sebagai pemain terdepan dalam mendukung tegaknya perbankan Islam di Bangladesh.

Profesionalisme dan kejujuran aktivitas mereka yang didukung kuat dan mendapat pengayoman oleh anggota Pengusaha Muslim Bangladesh dari Masyarakat Bisnis Nuslim (MBS). Badan ini berkonsentrasi memobilisasi penyediaan modal untuk keadaan darurat Bank Islam. Tugas kerja selanjutnya diembankan di pundak kelompok dan pribadi yang didukung secara aktif oleh pemerintah, sehingga bank perbankan Islam dapat bertahan sejak 23 tahun silam (sejak 1991).

Sayangnya, keberadaan operasi Bank Islam di Bangladesh untuk satu atau paruh dekade tertentu Tersisih dari bank-bank tradisional. Namun dari 39 bank yang ada, hanya 5 bank (termasuk di antaranya Bank Islam) dan dua cabang Bank Islam lainnya serta sebuah bank konvensional seperti bank perseroan utama atau Prime bank limited (PBL) memiliki prinsip-prinsip kerja berdasarkan Islam. Seperti halnya bank-bank tradisional komersial, mereka bekerja memobilisasi penabung dan pinjaman. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Bank yang beroperasi menurut Syariah dengan bank-bank komersial tradisional lainnya. Meskipun demikian, kini ada 5 Bank Islam yang beroperasi di Bangladesh, yaitu:

¹ Md. Abdul Awwal Sarker. *Islamic Banking in Bangladesh: Performance, problems and Prospects*. International Journal of Islamic Financial Services. Vol 1, No. 3. October-December 1999. Diterjemahkan oleh Syahrudin Yasen dalam rangka memenuhi mata kuliah Perbankan Islam pada konsentrasi Ekonomi Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Hamid Habe, SE.Ak., MA.

1. Islamic Bank Bangladesh limited (IBBL) = Bank Islam Bangladesh persero
2. Al-baraka Bank Bangladesh limited (Al-baraka) = Bank Al Baraka Bangladesh persero
3. Al Arafah Islami Bank limited (Al Arafah) = Bank Islam Arafah persero
4. Social investment bank limited (SIBL) = bank pembangunan sosial persero
5. Faysal Islamic Bank of Bahrain EC (FIBB) = Bank Islam Faisal Bahrain

Selain kelima Bank Islam tersebut, bank utama persero di Bangladesh telah membuka dua cabang perbankan Islam pada 18 Desember 1995, dan 17 bulan kemudian yakni pada 1997, secara berturut-turut berdiri pula bank Dhaka persero yang mulai beroperasi dengan menampilkan nuansa Islam dari tangan ke tangan sebagai prinsip kerja perkantoran yang berkonjungsi dengan operasi perbankan konvensional sejak lahirnya bank tersebut pada Juli 1999.

1. Bank Islam Bangladesh persero

Bank Islam Bangladesh Persero disatukan (dimerger) pada 14 Maret 1983, yang beroperasi pada 30 Maret 1983 dan secara total mengantarkan sebuah paket pelayanan perbankan di tahun 1983. Bank Islam Bangladesh persero (IBBL) dipertimbangkan menjadi bank pertama kali di Asia yang mempersoalkan bunga bank. IBBL adalah perusahaan perseroan milik publik yang bertanggung jawab di bawah perusahaan act 1931, yang merupakan perusahaan bank joint venture multinasional dengan 64% saham dibagikan kepada penyerta modal asing.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada susunan pemegang saham perbankan, pada rasio pembagian saham dilakukan dengan perbandingan 36- 54%. Pada Desember 1997. Artinya, 36% nisbah untuk bank dan 54% untuk penabung atau investor. Para anggota pemegang saham membeli 6.863 lembar, pembagiannya dikutip pada dua pasar saham negara bernama pasar saham Daka atau Daka Stock Exchange (DSE) dan Chittagon Stock Exchange (CSE), Bursa Saham Chittagon, menawarkan pembagian persentase penjualan tertinggi pada tiga kurun waktu tertentu daripada pembayaran di muka. Modal dasar bank ini sekira Tk 500 miliar.

Hingga kini IBBL telah membayar secara utuh modal sebesar 317.98 miliar Taka (mata uang Bangladesh Taka disingkat Tk) dan cadangan dana sekitar Tk 930.17 miliar. Bank tersebut dikelola oleh 23 anggota lembaga yang dipilih oleh para pemegang saham. Secara umum komite tersebut terdiri atas 8 orang direktur dan juga komite manajemen yang terdiri atas pimpinan eksekutif bank yang bertugas mengawasi fungsi bank sehari-hari.

Dewan Syariah juga mengambil bagian sebagai representasi dalam komisi. Kewenangan dan fungsi-fungsinya dibagi sesuai tugasnya. Bank tersebut juga mempunyai sekira 10 anggota dewan Syariah yang terdiri atas fuqoha, ahli ekonomi Islam dan ahli hukum. Tugas dewan Syariah mengkaji isu-isu yang terkait dengan Islam dan bank pada umumnya. Tugas dewan ini secara selektif melakukan audit atas pelaksanaan usaha pada masing-masing cabang Bank setiap tahun dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan serta memberikan masukan bagi perbaikan transaksi perbankan. Di samping itu komite dan dewan ini mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai oleh aktivitas perbankan pada berbagai posisi.

2. Bank Al Baraka Bangladesh persero

Bank milik negara kedua, yaitu bank Al Baraka Bangladesh persero, yang memulai bisnisnya hampir bersamaan dengan berdirinya bank-bank Islam pada 20 Mei 1987. Bank ini juga merupakan kelompok perusahaan bank Act 1913 yang membuka kantor di kota Daka bekerja sama dengan perusahaan Bank Pembangunan Investasi Al Baraka (ABIDCO) Jeddah Arab Saudi. Sebuah lembaga terkenal dunia yang bergerak di bidang pembangunan keuangan dan bisnis perbankan Islam, yang juga adalah kelompok Pengusaha terkenal Mitra pemerintah Bangladesh. Modal dasar bank ini antara Tk 600 miliar sampai dengan Tk 600.000 dan masing-masing Tk 1.000 saham biasa. Pada awalnya pengembalian modal bank adalah Tk 150.000 miliar. Kemudian modal bank berkembang dari Tk 150 miliar menjadi Tk 300 miliar, dengan rasio bagi hasil berkisar pada 1,1 bagi pemegang saham pada 1 Agustus 1992. Hingga kini sebagai konsekuensi pengembalian modal bank berada pada pembagian 259.553 miliar pada kelompok yang berbeda.

Operasi bank ini secara keseluruhan membawahi 32 cabang yang tersebar di dalam negeri Bangladesh. Bank ini dikelola oleh 15 direktur yang diangkat oleh para pemegang saham. Namun sejak bank Al Baraka dikelola anggota pengurus direktur sering tidak menemukan kecocokan hampir setiap saat, yang pada gilirannya bank dikelola oleh dewan eksekutif yang terdiri atas 7 direktur. Seperti halnya IBBL, Bank al-Baraka juga memiliki dewan Syariah yang tugasnya senantiasa memberi saran dan pendapat seputar isu-isu Syariah.

3. Bank Islam Al-Arafah persero

Bank Islam Al Arafah didirikan pada 18 Juni 1995 dan mulai beroperasi pada 27 September 1995 sebagai Bank Islam yang ketiga dalam sektor perbankan swasta di Bangladesh. Bank ini secara resmi memiliki modal Tk 1000 miliar dan potensi pengembalian modal Tk 207,6 miliar. Berbagai penawaran diberikan oleh bank niaga dan dalam pelayanannya

tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan dan persyaratan resmi perusahaan perbankan serta petunjuk yang ditetapkan dari Bank Bangladesh dari waktu ke waktu sejak 1991. Dari waktu ke waktu bank ini dikelola oleh 23 anggota direktur asing.

Bank ini mempunyai 7 anggota dewan Syariah yang terdiri atas ahli fiqih dan ahli hukum ekonomi Islam. Tugas dewan Syariah di sini memberi nasehat yang memastikan bahwa bank ini dapat bekerja sama dengan berbagai elemen yang sejalan dengan syariat Islam. Pada Agustus 1998 Bank Islam Al Arafah membuka 21 cabang di dalam negeri Bangladesh.

4. Bank investasi sosial persero

Bank Investasi sosial Persero atau social investment bank limited (SIBL) adalah Bank Islam ke-4 di Bangladesh. Didirikan pada 15 juli 1995 dan memulai operasinya pada 22 November 1995, bank ini juga cukup terkenal di dunia di antara beberapa organisasi Bank Islam milik pemerintah Bangladesh. Pada level operasional, Bank ini memiliki komitmen menjamin kemitraan pada tiga sektor ekonomi yaitu: a) Sektor ekonomi formal; b) Sektor ekonomi non formal; dan c) Sumbangan sukarela untuk syiar Islam.

Modal awal bank ini adalah Tk 1000 miliar yang dibagi masing-masing ke dalam Tk 1 miliar dari Tk 1000 miliar. Pada akhir Juni 1998, pengembalian modal bank berkisar pada Tk 120 miliar. Bank ini dikelola oleh 24 anggota pengurus direktur termasuk tiga di antaranya direktur asing dan sebagai bagian kepanitiaan. Bank ini juga mempunyai 8 orang anggota dewan Syariah terdiri atas ahli fiqih, ahli hukum ekonomi Islam dan pengacara. Dewan ini bertugas memberikan fatwa seputar isu-isu Islam yang pada umumnya dianut oleh bank. Pada Juni 1998, bank investasi sosial membuka 7 cabang di seluruh penjuru Bangladesh.

5. Bank Islam Faisal cabang Bahrain, Dhaka dan Bangladesh

Bank Islam Faisal Bahrain, Dhaka, Bangladesh memperoleh izin untuk membuka cabang 1 Bangladesh pada 16 Maret 1997. Bank ini secara efektif mulai berfungsi dari 11 Agustus 1997. Prinsip pelaksanaan Bank Islam Faisal cabang Bahrain Dhaka dan Bangladesh adalah menyediakan seluruh jenis pelayanan perbankan niaga bagi nasabahnya. Fungsi-fungsi bank ini secara tegas melaksanakan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan satu tujuan memastikan kesyariahan dengan melakukan pengecekan, monitoring melalui badan supervisi keagamaan: religius supervisory board (RSB) terhadap operasi bank-bank serta mengelola pelaporan secara berkala tentang operasi bank syariah. Dalam kasus-kasus terkini operasi dan aktivitas perbankan terlebih dahulu harus mendapatkan izin resmi dari badan supervisi (RSB)

untuk pengelolaan bank. Pada bank Islam Faisal cabang Bangladesh juga akan menjadi pemantau seperti halnya badan syariah seperti RSB.

6. Beberapa bank asing yang membuka cabang di Bangladesh

Selain cabang Bank Islam Faisal di Bahrain, terdapat tidak kurang 3 cabang lagi yang beroperasi dengan gaya Pakistan di Bangladesh, yaitu bank Habib persero, Bank Nasional Pakistan dan Bank Niaga Muslim Persero. Hal ini tersebut dapat dikatakan bahwa Pakistan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai tulisan para pakar bahwa bank-bank ini beroperasi berdasarkan hukum Islam. Tetapi sayang di Bangladesh, cabang-cabang bank tersebut masih beroperasi secara konvensional, namun pelaksanaan operasi perbankan syariah versi konvensional yang mereka lakukan tidak dikupas dalam kajian ini. Hanya saja aktivitas cabang Bank Islam Bahrain agaknya tercakup dalam kajian ini.

7. Perbankan Islam dalam bank-bank konvensional

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di dalam suatu negara Bangladesh terdapat dua bank konvensional yang telah mengambil inisiatif perseroan dalam aktivitas perbankan yang keberadaannya mengembangkan sistem konvensional. Dua bank dimaksud adalah bank utama persero dan bank data persero. Berturut-turut yang pertama dibuka adalah dua cabang Bank Islam, satu di Dhaka pada 18 Desember 1997, kemudian Bank Islam dapat Persero dibuka sebagai kantor untuk counter operasi yang menggunakan prinsip perbankan Islam. Bank Dhaka di tahun 1995 telah menarik para deposit dengan Rela berbondong-bondong menyimpan uang mereka tanpa mengharapkan imbalan berupa bunga. Namun dengan tetap memberi hak penawaran kepada nasabah yang berhubungan dengan sistem tradisional.

Bank utama Persero merupakan satu-satunya bank di Bangladesh yang cabang-cabangnya beroperasi dengan menggunakan kedua sistem yaitu sistem konvensional berdasarkan bunga dan berdasarkan sistem hukum Islam (Syariah) selain bank-bank tradisional negara yang menjadi induk bagi kesuksesan operasi mereka cabang-cabang perbankan Islam secara penuh. Bagaimanapun, dari sudut-sudut operasi cabang perbankan Islam secara serta bank utama Persero tetap beroperasi secara terpisah dengan menggunakan sistem perbankan konvensional. Dewan Syariah Juga secara konsisten di dalam memberikan fatwa dan memberi masukan pada operasi perbankan Islam yang ada. Pemerintah menghindari unsur-unsur bunga dalam keuangan pada cabang perbankan konvensional secara penuh dipisahkan dengan pengelolaan unit-unit perbankan Islam.

B. Analisis kinerja bank-bank Islam

Evaluasi kinerja merupakan suatu syarat yang penting bagi pengembangan dan pembangunan terhadap situasi berikutnya. Biasanya sebelum menentukan evaluasi terhadap bank-bank Niaga ditetapkan tujuan dan sasarannya, dengan merubah tujuan dan sasaran maka kriteria revaluasi telah mengalami kelebihan waktu. Mengevaluasi kinerja perbankan Islam di Bangladesh dipertimbangkan model efisiensi perbankan.

Kriteria model efisiensi perbankan (lima kriteria tes efisiensi) yang dikembangkan untuk mengukur tingkat efisiensi Sistem perbankan Islam. Kriteria ini adalah ukuran-ukuran dan pernyataan rasional. Analisis kinerja Bank Islam sejak dini hingga kini menjadi pembicaraan ini kita sedang melakukan analisis kinerja bank-bank Islam. Kriteria model ada lima, yaitu tes kriteria efisiensi untuk mengukur tingkat efisiensi sistem perbankan Islam di Bangladesh. Diskusi tersebut berhubungan dengan tes empiris dari analisis dinamik untuk melihat secara keseluruhan apa yang terjadi pada level kinerja operasi bank-bank Islam dengan perkembangan perbankan konvensional di Bangladesh. Data utama dikumpulkan dari bank-bank tersebut terutama yang berkaitan dengan departemen.

Dari lima tes kriteria efisiensi tersebut antara lain, yaitu tingkat efisiensi produktivitas salah satu di antaranya adalah tes kegunaan peluang investasi.

1. Tes kegunaan peluang investasi

Di bawah efisiensi produksi kita temukan bahwa tingkat kegunaan dana (FUR) bank IBBL secara progresif meningkat dari tahun 1989 sampai 1999 dengan penurunan sebesar 0,75 pada tahun 1993. Sementara di tahun 1996 sekira 100% tetapi turun lagi pada tahun 1997 sebesar 0,88%. Hal ini dapat disimak pada lampiran 1. Peringkat bank al-Baraka menunjukkan angka tertinggi setelah tahun 1989 karena sejumlah aset yang tidak produktif. Secara normal tingkatan ini seharusnya lebih rendah dibanding sekarang. Mencatat angka 65% pada tahun 1996 dan 75% pada 1997. Hal ini juga menggambarkan peningkatan tren dalam penggunaan dana. SIBL juga mencatat 65% - 63% pada level cabang perbankan Islam dibanding PBL yang hanya menggunakan dana mereka antara 48,70% pada 1996 yang kemudian turun drastis 30,23% pada 1997, disebabkan pada periode ini mereka membuka cabang baru. HIBB juga mencatat suku bunga lebih rendah di bawah 21% pada saat investasi dalam wilayah perusahaan. Simpanan per karyawan menunjukkan trend bauran bagi idbl, tetapi hal itu hanya menjadi ganda di tahun 1997 dibanding 1998. Abbl dan beberapa Bank Islam lainnya juga memperlihatkan trend perkembangan. Penggunaan dana per karyawan juga memperlihatkan trend yang sama bagi semua bank. Meskipun secara

relatif lebih baik namun bank masih di bawah level optimum penggunaan dana oleh bank-bank Islam yang selama ini diantara mereka bersaing keras dalam kondisi ekonomi terpuruk.

2. Tes maksimisasi

Secara keseluruhan ada empat indikator dalam melakukan tes maksimisasi, yaitu pendapatan, rasio pengeluaran, rasio pemasukan pengeluaran, dan rasio pengelolaan dana serta rasio dana karyawan. Pengalaman IBBL dan Al Arafah cenderung mengalami kemerosotan, sementara itu ABBL dan SIBL mengalami kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Kemerosotan pada dua Bank Islam tersebut terdapat pada pertumbuhan persentase investasi yang berubah menjadi ketentuan yang tergolong buruk dalam Pembayaran utang. ABBL mengalami kemerosotan besar yang mengakibatkan kerugian akibat pembayaran bunga utang. Sementara sibl mengalami kerugian selama periode tersebut akibat adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen bank.

3. Tes kelayakan (Project Efficacy Test)

Ini adalah untuk mengukur sejauh mana sebuah bank dapat memberikan kontribusi efektif dalam setiap proyek yang dikerjakan. Umumnya dapat ditentukan oleh tingkat hubungan di dalam membangun mekanisme pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut: a) Kriteria seleksi proyek; b) Pra penilaian pendanaan proyek; c) Supervisi keuangan Saat berjalan proyek; dan d) Jaringan dan mekanisme yang dibangun dalam membiayai proyek.

Analisis ini berdasarkan diskusi dengan para eksekutif beberapa bank bahwa bank-bank Islam sebelumnya mencoba secara selektif efisien mengambil beberapa bagian beberapa proyek, tetapi mereka tidak sanggup bertahan lama dalam situasi keuangan pada kasus-kasus tertentu. Mengapa hal itu terjadi?

4. Tes penyehatan pinjaman (Loan recovery test)

Suatu analisis yang menggambarkan sejumlah kesulitan piutang dari bank sentral terhadap perkembangan bank-bank Islam. Rasio kesulitan piutang dari total piutang berada pada 20% di tahun 1997 dari level 18% di tahun 1996. Bagaimanapun, beberapa ketentuan baru diundangkan untuk menanggulangi beberapa kesulitan akibat keterlambatan keterlambatan pengembalian.

5. Tes elastisitas dana pinjaman (Test of elasticity in loan financing)

Mekanisme pinjaman keuangan pada bank Islam masih kurang elastis. Bank Islam di negeri Bangladesh menghadapi sejumlah masalah dalam beberapa hal seperti kelemahan mereka Dalam menemukan para peminjaman dana termasuk dana modal kerja yang dibutuhkan para pengusaha. Mereka juga dililit masalah lemahnya pinjaman interbank sesuai dengan tenggang waktu peminjaman.

C. Problem dan tantangan perbankan Islam di Bangladesh

1. Problema dan tantangan secara alamiah

Bank Islam di dunia memperlihatkan wajah menantang. Secara perlahan tapi pasti perbankan Islam di Bangladesh juga banyak menghadapi masalah.

Pertama, mereka belum berhasil memikirkan sebuah mekanisme bebas bunga untuk menempatkan dana mereka pada basis jangka pendek. Mereka memperlihatkan masalah yang sama dalam pinjaman dana konsumtif dan simpanan (devisa) pemerintah.

Kedua, target risiko keuntungan (risk of profit sharing) yang dihadapi sepertinya terlalu tinggi pada hampir semua seluruh bank Islam di Bangladesh. Mereka cenderung memilih pembiayaan yang besar yang seolah mereka yakin dapat mengembalikannya. Sebagai akibatnya, muncul berbagai kecaman bahwa bank-bank tersebut sungguh tidak mempunyai itikad baik menghapuskan bunga. Namun kenyataannya mereka hanya merubah nomenklatur dalam transaksi mereka.

Ketiga, bank-bankg Islam setempat tidak mendapat dukungan legalitas dari bank sentral Bangladesh, serta tidak mempunyai tenaga ahli dan tenaga terlatih dalam menilai, mengawasi, mengevaluasi dan mengaudit proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan besar. Akibatnya mereka tidak sanggup melakukan pengembangan di samping tidak memiliki kelebihan likuiditas keuangan. Pelaksanaan usaha perbankan yang bebas bunga juga merupakan suatu pertanyaan dan masalah yang cukup potensial yang patut dikaji dilihat dari sisi makro dan mikro ekonomi.

2. Masalah hubungan operasi bank-bank Islam (Problem related to makro Operation of the Islamic Banks)

Di antara isu-isu yang dihadapi bank-bank Islam di Bangladesh yaitu: 1) Modal dan likuiditas (liquidity and capital); 2) Penilaian aset-aset bank (valuation of bank asset); 3) Stabilitas keuangan (Financial stability); 4) Kepemilikan bank (The ownership of banks); 5) Lesunya pasar modal dan instrumen keuangan bebas bunga (Lack of capital Market and interest free financial instrument); 6) Lemahnya perlindungan hukum (insufficient legal protection); 7) Pengawasan dan supervisi oleh bank sentral terhadap bank

beroperasi menurut Syariah (controlling and supervision by the Central Bank on the basis of Islamic Syariah); 8) Terbatasnya kewenangan perhimpunan Syariah (lack of unified Syariah rulings); 9) Kurangnya pasar uang inter Bank Islam (absence of Islamic inter-bank money market); 10) Peraturan baru perbankan (new banking regulation); 11) Prinsip-prinsip dan prosedur laporan keuangan (accounting principles and procedure); 12) Kurangnya dukungan dan jaringan kelembagaan (shortage of supportive and link institution); 13) Kurangnya tenaga terampil dan ahli hukum dalam perbankan Islam (shortage of skilled and trained manpower on Islamic Syariah banking); 14) Lemahnya kerjasama di antara bank-bank Islam (Lack of Cooperation among the Islamic Banks); 15) Kurangnya sosialisasi dengan lembaga keuangan internasional dan produk sektor non keuangan Islam dengan para produsen (lack of familiarity by International Financial and non financial sector with Islamic product and procedures); 16) Beratnya persaingan dalam sektor keuangan (Severe competition in the financial sector); 17) Terpuruknya perekonomian dan situasi politik dalam negeri (economics slowdown and political situation of the country); 18) Laporan jejak perbankan Islam masih lemah (inadequaty track record of Islamic banking); 19) Kurangnya infrastruktur untuk perdagangan keuangan Islam di tingkat Internasional (absence of infrastruktur for International Islamic trade financing); 20) Budaya malas dan suka berhutang (Defaulting culture of the borrowers); 21) Konsentrasi aset jangka pendek dalam Bank Islam (Shortterm assets concentration in the Islamic Bank); 22) Kurangnya pelatihan atau tulisan di bidang ekonomi, lemahnya lembaga pendidikan Perbankan dan Keuangan Islam (lack of course of paper on Islamic Economic, banking and Finance at the educational institution); 23) Kurangnya keseragaman dalam prosedur operasional perbankan Islam (Lack of uniform operational procedure of Islamic Bank); 24) Kurangnya ahli-ahli Bank Islam dan lembaga-lembaga non bank (lack of specialised Islamic Banks and non bank financial institution); 25) Kurangnya lembaga perhimpunan bank-bank Islam (of the islamic Banks); 26) Kurangnya harmonisasi pekerja keuangan Islam (Lack of harmonization of Islamic financial practices); 27) Kurangnya kajian antar negara dalam praktek operasi perbankan Islam (lack of inter-country study on the practical Operation of Islamic banking); 28) Lemahnya pasar sekunder surat-surat berharga (lack of secondary securitisation market); 29) Kurangnya koordinasi pekerjaan penelitian ekonomi Perbankan dan Keuangan (lack of coordinated research work on Islamic economics banking and Finance); dan 30) Belum Adanya lembaga pengembangan karir untuk perbankan Islam (lack of apex training institute for the Islamic Bank)

3. Masalah hubungan operasional mikro Bank Islam (problem related to micro Operation of the Islamic Bank)

Hal-hal yang terkait dengan masalah dalam hubungan operasional mikro bank-bank Islam adalah: 1) Biaya pengembangan informasi (increased cost of information); 2) kontrol kelebihan pendanaan (control over cost of fund); 3) Penggelembungan keuangan dan berkembangnya korupsi (mark up financing and corrupted mark up); 4) Kelebihan nilai pada model keuangan murabahah (Excess Resort to the murabaha model of financing); 5) Penggunaan tingkat bunga yang baik pada margin profit dalam model al-Bay (utilization of interest rate of fixing the profit margin in Bai-models); 6) Konsen dana pengembangan sosial (financial sosial concern); 7) Kekurangtanggapan terhadap kebutuhan keuangan pemerintah (lack of positive response to the requirement of government financing); 8) Gagalnya bank-bank Islam mengembalikan dana pada Proyek besar (Failure of Islamic Banks to Finance high return Project); 9) Terjadinya ketidakefisienan alokasi dana (Sacrifice of allocate efficiency); 10) Hilangnya efisiensi distribusi (loss of distributive efficiency); 11) Terjadinya kerugian/depresi pendapatan (depression of profit); 12) Lemahnya audit Syariah (lack of full fledged Syariah audit); 13) Penipuan manipulasi atau korupsi pada bank-bank Islam (fraud-forgery or corruption in Islamic Bank); 14) Rendahnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan (minimum budget for research and development); 15) Lingkungan pekerjaan (working environment); 16) Biaya garansi (issuance of letter of guarrantee - L/G); 17) Operasi Syariah masih manual atau petunjuk operasional (lack of Syariah manual or guidelines); 18) Analisis risiko investasi dan metodologi penilaian (Islamic investment risk analysis and measurement methodology); 19) Tidak adanya tanda kelonggaran kewajiban bagi pembeli perumahan melalui bank (non-exemption of stamp Duty for purchasing property by banks); 20) Lemahnya dukungan kerjasama antara bank-bank Islam dan LSM Islam untuk perpanjangan kredit mikro (lack of cooperation between Islamic Banks and Islamic NGOs for extending microcredit); 21) Kurangnya pendirian dan jaringan dengan lembaga-lembaga pelatihan dan bahan-bahan supervisi Syariah (lack of establishment of links with other training Institute and Syariah supervisory bodies); 22) Jarangnya manajemen menjadikan Syariah sebagai petunjuk (lack of intention of the management to the strict with Syariah guidelines).

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, BL. & Sherrel, DL. (1996). The Role of Affect in Consumer Satisfaction Judgement of Credence Based Service. *Journal of Business Research*, Vol. 37. pp. 71-84.
- Anderson, WT., Jr, Cox, EP, & Fulcher, DG. (1976). Bank Selection Decisions and Market Segmentation. *Journal of Marketing*, Vol. 40, pp. 40-45
- Bitner, MJ. (1990). Evaluation Service Encounter: The Effect of Physical Surrounding and Employee Responses. *Journal of Marketing*, Vol. 54. pp. 69-82
- Bitran, G and Lojo, M. (1993). A framework for analyzing the quality of the customer interface. *European management Journal*. Vol. 11 No. 4. December pp. 385 -396
- Cronin, JJ Jr and Taylor, SA. (1992). Measuring service quality examination and extension. *Journal of Marketing*. Vol. 56, pp 55-68
- Denton, L. and Chan, A. (1991). Bank selection criteria of multiple Bank users in Hong Kong. *International Journal of Bank Marketing*. Vol. 9, No. 5, pp. 23-34
- East, R. (1997). *Consumer Behavior: advance and application in marketing*. Prentice Hall London.
- Errol, C. and El-Bdour, R. (1989). Attitudes, behavior and patronage factors of Bank customers towards Islamic Bank. *International Journal of Bank marketing*. Vol. 7. No. 6, pp. 31
- Errol, C., Kaynak, E., and El-Bdour, R. (1990). Conventional and Islamic Banks patronage Behavior of Jordanian Customer. *International Journal of Bank marketing*. Vol. 8, No. 4, pp. 25-35
- File, KM., and Prince, RA. (1992). Positive word of mouth customer satisfaction and buyer Behavior. *International Journal of Bank marketing*. Vol. 10, No. 1, pp. 25-29
- Gerrard, P., and Cunningham, JB. (1997). Islamic banking: a study in Singapore. *International Journal of Bank marketing*. Vol. 15, No. 6, pp. 204-216.
- Goode, M., and Moutinho, L. (1995). The effect of Free banking on overall satisfaction the use of automated teller machine. *International Journal of Bank marketing*. Vol. 13, No. 4, pp. 33-40
- Goode, M., and Moutinho, L. (1996). The effect of consumer age on overall satisfaction: an application to financial service. *Journal of Professional Service marketing*. Vol. 13, No. 2 pp. 93-112